

Penguatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Melalui Pelatihan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas

Jeanne Noveline Tedja

FISIP/Sosiologi, Universitas Nasional, Jl. Sawo Manila No.61 Pasar Minggu Jakarta

Jeanne.tedja@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) memiliki kekayaan alam yang melimpah, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, KKA memiliki kekayaan budaya yang kaya, terutama dalam hal adat dan budaya maritim. Melalui Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun 2000-2025, KKA termasuk ke dalam rencana pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang di arahkan pada pariwisata maritim. Pemerintah KKA menyadari pentingnya memperkuat komunitas adat maritim khususnya bagi Kelompok Sadar Wisata sebagai ujung tombak pemberdayaan pariwisata sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemberdayaan sosial budaya dan ekonomi di daerah ini. Melalui penguatan komunitas adat maritim, Pemerintah KKA berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang ada. Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa penguatan kapasitas kelompok sadar wisata, dengan metode pelaksanaan berupa pelatihan pariwisata berbasis masyarakat yang diselenggarakan selama 3 hari dan terdiri dari materi dan praktek sekaligus diskusi mengenai studi kasus. Hasil dari kegiatan ini diantaranya peserta memiliki pengetahuan dasar tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip kepariwisataan dalam konteks pelatihan pariwisata berbasis masyarakat; dapat mengimplementasikan konsep dan prinsip pariwisata berbasis masyarakat yang berfokus pada partisipasi komunitas; serta memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menerapkan kode etik kepariwisataan dalam upaya menjalankan pariwisata berbasis masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat di KKA bagi 11 peserta yang merupakan kelompok sadar wisata ini dinilai telah berhasil mencapai tujuannya yaitu berupa penguatan kapasitas kelompok sadar wisata melalui pelatihan pariwisata berbasis masyarakat.

Kata kunci: pariwisata berbasis masyarakat, partisipasi masyarakat, pokdarwis, anambas, maritim

ABSTRACT

Anambas Islands Regency (KKA) has abundant natural resources, especially in the marine and fisheries sectors. Apart from that, KKA has a rich cultural heritage, especially in terms of maritime customs and culture. Through the National Tourism Development Master Plan (RIPPARNAS) for 2000-2025, KKA is included in the National Tourism Destination (DPN) development plan which is directed at maritime tourism development. The KKA government realizes the importance of strengthening maritime traditional communities, especially for the Tourism Awareness Group as the spearhead of tourism empowerment as part of efforts to increase socio-cultural and economic empowerment in this area. By strengthening maritime traditional

communities, the KKA Government hopes to improve the welfare of local communities and maintain the sustainability of existing natural resources. The aim of holding this community service activity is to strengthen the capacity of tourism awareness groups, with the implementation method in the form of community-based tourism training which is held in three days and consists of material and practice as well as discussion of case studies. The results of this activity include participants having basic knowledge about tourism concepts and principles in the context of community-based tourism training; can implement community-based tourism concepts and principles that focus on community participation; and have the understanding and ability to apply a tourism code of ethics in an effort to run community-based tourism. The community service activities carried out at KKA for 11 participants who are part of the tourism awareness group are considered to have succeeded in achieving their goal, namely strengthening the capacity of the tourism awareness group through community-based tourism training.

Keywords: *community-based tourism, community participation, anambas, maritime*

A. PENDAHULUAN

Kepulauan Anambas terdiri dari sejumlah pulau yang berada di Laut Natuna, dengan bagian utara dikelilingi oleh Laut Natuna Utara. Kepulauan ini berbatasan dengan tiga negara: Malaysia di barat, serta Vietnam dan Thailand di utara. Anambas memiliki keunikan tersendiri, karena meskipun Laut China Selatan terkenal dengan gelombang yang kuat, perairan di Anambas cenderung lebih tenang. KKA, yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 / Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008. Kabupaten ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, KKA juga memiliki kekayaan budaya yang kaya, terutama dalam hal adat dan budaya maritim. Ibukota KKA adalah Tarempa. Peran Tarempa adalah sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan telah meningkatkan daya tariknya terhadap berbagai etnis, berbeda dengan kecamatan Palmatak yang baru dibentuk pada tahun 2001 dan belum menunjukkan perkembangan signifikan hingga saat ini, baik dalam pembangunan, ekonomi, maupun jumlah penduduk. Masyarakat Kecamatan Palmatak secara ekonomi masih berorientasi ke kota Terempa, dimana masyarakatnya berbelanja berbagai keperluan dari primer, sekunder bahkan tersier yang tersedia di Terempa. Demikian halnya dengan sarana perhubungan dimana kapal-kapal PELNI yang menghubungkan Ibukota kabupaten dan Ibukota provinsi, hanya berlabuh di Terempa. Dalam konteks perekonomian maritim, pertahanan dan ketahanan kawasan merupakan bidang yang sangat strategis, sehingga potensi maritim dan pertambangan memerlukan pertahanan dan keamanan, dan Kepulauan Riau khususnya

Kepulauan Anambas sangat penting bagi Indonesia. Wilayah perbatasan dengan perairan yang luas dan pantai yang sangat panjang.

Berdasarkan data BPS Tahun 2022, Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) memiliki luas wilayah 590,14 km² dengan 10 kecamatan, 2 kelurahan dan 52 desa. Jumlah penduduk Kepulauan Anambas sebesar 48.737 jiwa dengan dan sebaran penduduk 74 jiwa/km². KKA sebagai wilayah Indonesia bagian barat dan pulau terluar memiliki potensi maritim yang sangat strategis. Wilayah ini terletak secara strategis di jalur pengembangan *New Regional Cruise Corridors* dari Singapura-Manila-Hongkong, yang kaya akan sumber daya alam pariwisata yang berbasis maritim. Dengan kondisi geografis yang strategis, pariwisata maritim memainkan peran kunci dalam mendorong pembangunan ekonomi di KKA. Melalui Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun 2000-2025, KKA telah masuk ke dalam rencana pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang di arahkan pada pembangunan pariwisata bahari. Sektor ini diyakini sebagai sektor strategis karena potensial menyerap tenaga kerja lebih banyak. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menyadari pentingnya memperkuat komunitas adat maritim khususnya bagi Kelompok Sadar Wisata sebagai ujung tombak pemberdayaan pariwisata sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemberdayaan sosial budaya dan ekonomi di daerah ini. Komunitas adat maritim memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus dalam mengelola sumber daya alam, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Dengan memperkuat komunitas adat maritim, Pemerintah Kabupaten Anambas berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang ada.

Destinasi pariwisata merupakan titik fokus di mana produksi, konsumsi, dan arus perjalanan wisata terjadi (Davidson dan Maitland, 1997). Lebih dari sekadar tempat wisata, destinasi wisata juga berfungsi sebagai habitat bagi masyarakat untuk bekerja serta melaksanakan aktivitas sosial dan budaya. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat adalah elemen kunci dalam pembangunan destinasi wisata, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terdapat dalam masyarakat. Menurut Dogra dan Gupta (2012), masyarakat memiliki peran yang strategis dalam pengembangan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, kesinambungan pembangunan destinasi wisata sangat bergantung pada keterlibatan dan partisipasi aktif dari masyarakatnya. Komunitas atau masyarakat lokal di destinasi pariwisata memiliki potensi untuk mengembangkan berbagai aktivitas

menjadi produk pariwisata yang menarik. Faktor-faktor seperti kekayaan budaya lokal, warisan masyarakat, dan perayaan tradisional memberikan keunikan dan daya tarik bagi para wisatawan. Masyarakat lokal, yang memiliki pemahaman yang dalam tentang produk pariwisata yang dikembangkan dan potensi dampaknya, cenderung lebih sadar daripada pihak luar yang kurang familiar dengan destinasi tersebut. Selain itu, peran masyarakat lokal juga penting dalam mempromosikan produk destinasi pariwisata karena mereka berperan sebagai elemen utama dalam membentuk citra destinasi pariwisata. (Pike, 2004)

Keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan destinasi pariwisata yang berkelanjutan diakui sebagai faktor yang sangat penting, sehingga muncul pilihan alternatif dalam pengembangan pariwisata. Salah satu alternatif yang populer dikenal sebagai *community based tourism* (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat (PBM). Menurut Tosun dan Timothy (2003), poin kunci dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah penekanan pada pariwisata berbasis masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pembangunan pariwisata. Melalui partisipasi yang aktif ini, pariwisata dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal. Dengan menerima manfaat tersebut, dukungan dan penerimaan masyarakat terhadap pariwisata dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Meskipun secara teoritis, keterlibatan masyarakat lokal dalam industri pariwisata diyakini dapat mendukung pembangunan destinasi pariwisata yang berkelanjutan namun dalam praktiknya banyak tantangan dan hambatan yang muncul. (Campbell, 1999; Shah & Gupta, 2000; Scheyvens, 2002; Dogra & Gupta, 2012) Tantangan yang sering timbul terutama berkaitan dengan keragaman masyarakat lokal dan upaya memasukkan pariwisata ke dalam strategi pembangunan komunitas lokal. Sementara itu, terdapat beberapa hambatan meliputi keterbatasan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan distribusi manfaat pariwisata di kalangan masyarakat setempat.

Relevansi inisiatif diadakannya penguatan kapasitas kelompok sadar wisata melalui pelatihan pariwisata berbasis masyarakat ini didasarkan pada pokok permasalahan yang dihadapi KKA dalam mengembangkan wisata maritim berbasis masyarakat, sebagai berikut :

- 1) Adanya gap kebijakan dengan potensi pengembangan wisata maritim berbasis adat di KKA;
- 2) Belum terintegrasinya kekayaan budaya masyarakat adat dalam rencana pengembangan wisata maritim KKA;
- 3) Belum terbangunnya kolaborasi antar pihak dalam pengembangan wisata maritim di KKA sesuai dengan prinsip ekowisata yang berkelanjutan

B. METODE PELAKSANAAN

Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penguatan kapasitas kelompok sadar wisata melalui pelatihan pariwisata berbasis masyarakat ini diantaranya:

- 1) Peserta memiliki pengetahuan dasar tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip kepariwisataan dalam konteks pelatihan pariwisata berbasis masyarakat
- 2) Peserta dapat mengimplementasikan konsep dan prinsip pariwisata berbasis masyarakat yang berfokus pada partisipasi komunitas.
- 3) Peserta memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menerapkan kode etik kepariwisataan dalam upaya menjalankan pariwisata berbasis masyarakat.

Kegiatan penguatan kapasitas kelompok sadar wisata melalui pelatihan pariwisata berbasis komunitas dengan konsep Training of Trainer (ToT) ini diselenggarakan selama tiga hari pada tanggal 9, 10 dan 11 Oktober 2023. Lokasi kegiatan adalah di Pulau Belibak, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Materi pelatihan ini bertujuan memberikan pengetahuan dasar, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membangun dan mengelola pariwisata berbasis masyarakat. Materi pelatihan berupa modul yang terdiri dari:

- Materi: Konsep dan Prinsip Pariwisata Berbasis Masyarakat
- Materi: Budaya dan Kearifan Lokal
- Materi: Partisipasi Masyarakat
- Praktek: Perencanaan Pariwisata Partisipatif
- Praktek: Integrasi Masyarakat dalam Perencanaan Pengembangan Wisata
- Praktek: Studi Kasus dan *Best Practice*

Peserta pelatihan adalah Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Pelaku usaha wisata dan transportasi yang terdiri dari 11 trainee representasi dari kecamatan Jemaja, Jemaja Timur, Siantan, Siantan Selatan, dan Desa Belibak.

Kegiatan ToT dibuka oleh Kepala Desa Belibak, Bpk. Marzuki pada prosesi pembukaan yang dilaksanakan pada hari Senin, 9 Oktober 2023 pukul 09.00WIB, dihadiri oleh seluruh peserta dan trainer.

Tabel 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan ToT

Hari ke:	Jadwal	Pukul	Materi / Praktek
1.	9 Oktober 2023	10.00-12.00	Materi: Konsep dan Prinsip Pariwisata Berbasis Masyarakat
		13.00-15.00	Materi: Budaya dan Kearifan Lokal
2.	10 Oktober 2023	10.00-12.00	Materi: Partisipasi Masyarakat
		13.00-15.00	Praktek: Perencanaan Pariwisata Partisipatif
3.	11 Oktober 2023	10.00-12.00	Praktek: Integrasi Masyarakat dalam Perencanaan Pengembangan Wisata
		13.00-15.00	Praktek: Studi Kasus dan <i>Best Practice</i>

Sumber: Data Pengabdian kepada Masyarakat 2023



Sumber: Dokumentasi Pengabdian kepada Masyarakat 2023

Gambar 1. Penyampaian materi oleh trainer



Sumber: Dokumentasi Pengabdian kepada Masyarakat 2023

Gambar 2: Pembukaan Acara TOT oleh Kepala Desa Belibak Bapak Marzuki

C. PEMBAHASAN

Konsep pariwisata berbasis masyarakat telah menempatkan pemberdayaan masyarakat dan integrasi mereka dalam pengembangan pariwisata di Anambas sebagai hal penting. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat dari sektor pariwisata. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dan pembangunan pariwisata dikenal dengan istilah pariwisata berbasis masyarakat.

Keputusan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu poros maritim dunia adalah langkah yang visioner dan strategis, meskipun memerlukan waktu yang lama, investasi yang besar dan konsistensi dalam kebijakan pembangunan nasional. Keputusan ini juga harus mengubah cara pandang kita dari melihat Indonesia sebagai negara agraris menjadi negara maritim. Kebijakan ini juga selayaknya mengubah pendekatan pembangunan nasional kita dari yang berpusat pada populis sentris menjadi yang berfokus pada potensi wilayah. Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu pusat maritim Indonesia karena memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat besar. Selain potensi perikanan yang mencapai ratusan juta ton dan keanekaragaman biota laut yang melimpah, Kepulauan Riau juga memiliki sumber daya tambang gas dan minyak yang signifikan. Salah satu wilayah Kepulauan Riau yaitu Kepulauan Anambas memiliki sejarah yang cukup panjang sebagai wilayah maritim. Kondisi geografis yang didukung oleh letak strategis menjadikan pariwisata maritim sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi

di KKA. Melalui Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun 2000-2025, KKA masuk ke dalam rencana pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang di arahkan pada pembangunan pariwisata maritima atau bahari. Sektor ini diyakini sebagai sektor strategis dan potensial dapat menyerap tenaga kerja yang besar. Pembangunan pariwisata maritim sebagai industri multi sektoral sangat membutuhkan dukungan berbagai multi pihak khususnya masyarakat adat maritim sebagai partisipan aktif dan penerima manfaat industri tersebut. Pembangunan wisata maritim ini juga sangat membutuhkan kapasitas pemerintah daerah / lokal serta penguatan pemberdayaan berbasis komunitas bagi komunitas adat maritim di KKA, khususnya bagi kelompok sadar wisata (pokdarwis) melalui pelatihan pariwisata berbasis masyarakat sehingga terbangunnya komunitas wisata maritim yang tangguh. Meskipun secara teori, partisipasi masyarakat lokal dalam industri pariwisata diyakini dapat mendukung pembangunan destinasi pariwisata yang berkelanjutan, namun dalam praktiknya, terdapat banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Tantangan yang sering muncul terutama berkaitan dengan keberagaman masyarakat lokal dan proses memperkenalkan pariwisata sebagai bagian dari strategi pembangunan mereka. Hambatan lain mencakup keterbatasan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan serta distribusi manfaat pariwisata di antara mereka.

Pembangunan pariwisata maritim sebagai industri multi sektoral sangat membutuhkan dukungan berbagai multi pihak khususnya masyarakat adat maritim sebagai partisipan aktif dan penerima manfaat industri tersebut. Oleh karena itu pelatihan ini sangat disambut baik oleh para peserta pelatihan yang terdiri dari kelompok sadar wisata yang dapat memastikan pencapaian tujuan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Pariwisata Berbasis Masyarakat. Mereka sangat antusias mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir.

Pada hari pertama pelatihan, peserta diberikan materi oleh pemateri yang terdiri dari:

1. Materi: Konsep dan Prinsip Pariwisata Berbasis Masyarakat

Bagian ini menjelaskan konsep pariwisata berbasis masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat merupakan salah satu bentuk pariwisata alternatif di mana partisipasi masyarakat menjadi unsur kunci dalam upaya mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (Telfer dan Sharpley, 2008). Konsep ini sejalan dengan pandangan Garrod et al., (2001) dan Timothy dan Boyd (2003), yang menggambarkan pariwisata

berbasis masyarakat sebagai keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan pariwisata. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat lokal dapat terwujud melalui dua aspek utama, yaitu proses pengambilan keputusan dan distribusi manfaat pariwisata. Partisipasi dalam pengambilan keputusan mencakup kemampuan masyarakat lokal untuk mengungkapkan harapan, keinginan, dan kekhawatiran terkait pembangunan pariwisata, yang selanjutnya menjadi masukan krusial dalam proses perencanaan. Lebih lanjut dijelaskan Menurut Murphy, Pariwisata merupakan sebuah "industri komunitas", sehingga kesinambungan pembangunan pariwisata sangat bergantung pada penerimaan dan dukungan dari masyarakat lokal terhadap sektor pariwisata. Konsekuensi dari pariwisata sebagai industri masyarakat adalah bahwa pariwisata tidak hanya harus melibatkan masyarakat lokal yang secara langsung mendapat manfaat dari kegiatan pariwisata, tetapi juga mereka yang secara tidak langsung ikut berperan dalam pengembangan pariwisata. Pariwisata berbasis masyarakat dianggap berbeda dengan model pariwisata besar yang terkonsentrasi dalam paket-paket yang termasuk segalanya, wisata massal, dan memiliki sedikit hubungan dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pariwisata berbasis masyarakat dikenal juga sebagai pariwisata skala kecil, yang dikembangkan oleh komunitas lokal dengan keterlibatan berbagai unsur lokal seperti pelaku usaha, organisasi, dan pemerintah setempat.

Berdasarkan Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa peluang terbesar untuk melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata akan muncul jika pariwisata dikembangkan dalam skala kecil dan mengadakan interaksi terbuka dengan wisatawan.

Tabel 2. Karakteristik Pembangunan Pariwisata Skala Kecil dan Skala Besar

Skala Kecil	Skala Besar
Secara fisik menyatu dengan struktur ruang/kehidupan masyarakat lokal	Secara fisik terpisah dari komunitas lokal, namun efektif membangun citra kuat dalam rangka promosi
Perkembangan kawasan wisata bersifat spontan/tumbuh atas inisiatif masyarakat lokal (spontaneous)	Pengembangan kawasan melalui perencanaan yang cermat dan profesional (well planned)

Partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata	Investor dengan jaringan internasional sebagai pelaku utama usaha kepariwisataan
Interaksi terbuka dan intensif antara wisatawan dengan masyarakat lokal	Interaksi sangat terbatas antara wisatawan dengan masyarakat lokal
Sumber : Jenkins, 1982	

2. Materi: Budaya dan Kearifan Lokal

Bagian ini menjelaskan mengenai pandangan para ahli tentang pentingnya budaya dan kearifan lokal dalam konteks pariwisata dan pembangunan masyarakat. Berikut adalah beberapa di antaranya:

- a) Edward Burnett Tylor: Seorang antropolog Inggris yang memperkenalkan konsep kultur sebagai suatu sistem yang kompleks yang mencakup kepercayaan, nilai, adat istiadat, dan praktik-praktik lainnya. Tylor menyatakan bahwa budaya meliputi semua aspek pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, tradisi, dan kebiasaan yang dimiliki manusia sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.
- b) Clifford Geertz: Seorang antropolog Amerika yang mengembangkan konsep "deskripsi tebal" (thick description) dalam antropologi budaya. Geertz menekankan pentingnya memahami makna budaya lokal dalam konteks yang luas dan mendalam, serta menganalisis simbol-simbol dan makna di balik tindakan manusia.
- c) Arjun Appadurai: Seorang antropolog India yang mengemukakan konsep "globalisasi dari bawah" (grassroots globalization) yang menyoroti peran budaya lokal dalam menghadapi globalisasi. Appadurai menggarisbawahi pentingnya melibatkan budaya lokal dalam proses globalisasi dan menekankan pluralitas budaya.
- d) James Clifford: Seorang antropolog Amerika yang menyoroti kompleksitas dan dinamika budaya dalam konteks perubahan global. Clifford memperkenalkan gagasan tentang "etnografi kolaboratif" yang menghargai pengetahuan lokal dan memperkuat suara masyarakat lokal dalam penyusunan narasi tentang identitas dan sejarah mereka.

- e) David C. Korten: Seorang pengamat pembangunan yang mengadvokasi model pembangunan berbasis masyarakat (community-based development). Korten menekankan pentingnya membangun ekonomi lokal yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif yang didasarkan pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Para ahli tersebut, bersama dengan banyak lainnya, telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang peran budaya dan kearifan lokal dalam pembangunan masyarakat dan pariwisata. Dengan memperhatikan pandangan mereka, pembangunan pariwisata dapat diarahkan untuk menghargai, melestarikan, dan memanfaatkan kekayaan budaya dan kearifan lokal dengan lebih efektif.

Budaya dan kearifan lokal merujuk pada warisan nilai, norma, tradisi, dan praktik yang menjadi bagian integral dari suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Di dalamnya termasuk berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti bahasa, agama, seni, musik, tarian, ritual, kepercayaan, sistem nilai, dan pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Budaya lokal mencerminkan identitas suatu komunitas dan mencakup cara hidup, pemikiran, dan sikap yang unik bagi masyarakat tersebut. Hal ini juga mencakup cara-cara tradisional dalam berinteraksi, berkomunikasi, serta mengelola sumber daya alam dan lingkungan sekitar.

3. Materi: Partisipasi Masyarakat

Bagian ini menjelaskan mengenai beberapa ahli yang telah menyumbangkan pandangan mereka tentang partisipasi masyarakat dalam berbagai konteks, termasuk pembangunan, pengelolaan sumber daya, dan pariwisata. Berikut adalah beberapa ahli yang berkontribusi dalam pemahaman tentang partisipasi masyarakat:

- a) Sherry Arnstein: Arnstein dikenal karena merumuskan "Tangga Partisipasi" (The Participation Ladder) yang membagi partisipasi masyarakat ke dalam delapan tingkatan, dari "Manipulasi" hingga "Kendali Warga". Konsep ini menyoroti tingkat kekuatan dan pengaruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
- b) Robert Chambers: Chambers merupakan pakar dalam bidang pengembangan internasional yang memperkenalkan gagasan "partisipasi yang responsif". Dia menekankan pentingnya mendengarkan dan menanggapi aspirasi, kebutuhan, dan keinginan masyarakat dalam proses pengembangan.

- c) Amartya Sen: Seorang ekonom dan filsuf yang memperkenalkan konsep "partisipasi sebagai kemerdekaan" dalam konteks pembangunan. Menurut Sen, partisipasi masyarakat tidak hanya tentang keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga tentang menciptakan kondisi di mana individu memiliki kebebasan dan kesempatan untuk memengaruhi kehidupan mereka sendiri.
- d) R. David Prentice dan Harry W. Richardson: Dalam konteks pariwisata, Prentice dan Richardson menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan pariwisata. Mereka menekankan perlunya melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, pengelolaan, dan manfaat dari industri pariwisata.
- e) Ivan Illich: Illich adalah seorang filsuf yang menyoroti konsep "partisipasi radikal", yang menekankan pentingnya memperkuat kemandirian dan kontrol masyarakat terhadap lingkungan dan kehidupan mereka sendiri. Baginya, partisipasi sejati adalah ketika masyarakat memiliki kendali penuh atas keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Melalui kontribusi-kontribusi mereka, para ahli ini telah membantu memperkaya pemahaman tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam berbagai konteks pembangunan dan pengelolaan, termasuk dalam industri pariwisata. Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan, kontribusi, dan pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau komunitas dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi program atau kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini mencakup berbagai tingkatan dari tingkat individual hingga tingkat komunitas yang lebih luas.

4. Praktek: Perencanaan Pariwisata Partisipatif

Pada sesi praktikum ini, pemateri memberikan pandangan mengenai perencanaan pariwisata partisipatif. Sebagian besar ciri atau pendekatan perencanaan pariwisata berbasis masyarakat berasal dari warisan perencanaan transaksi dan advokasi. Warisan ini menekankan perlunya membela kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan memberikan kendali yang lebih besar kepada masyarakat setempat dalam proses pembangunan sosial, dengan harapan mencapai kesejahteraan. (Timothy, 1999) Murphy (1985) juga menyoroti strategi yang berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan

pariwisata dari perspektif baik wisatawan maupun masyarakat lokal. Masyarakat lokal diharapkan mampu mengenali berbagai manfaat atau kontribusi pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pendekatan perencanaan ini mengakui pentingnya memperhatikan kepentingan masyarakat dalam perencanaan pariwisata. Pariwisata seharusnya tidak hanya memuaskan wisatawan tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.

Selanjutnya, pemateri memberikan langkah-langkah mempraktekan perencanaan partisipatif dan meminta peserta membuat perencanaan:

- a) **Identifikasi Stakeholder:** Identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam industri pariwisata di destinasi tertentu, termasuk masyarakat lokal, pemerintah daerah, pemangku kepentingan industri, organisasi non-pemerintah (LSM), dan lainnya.
- b) **Konsultasi Publik:** Melakukan serangkaian pertemuan, forum, atau konsultasi publik untuk mendengarkan pandangan dan aspirasi masyarakat serta memahami kebutuhan lokal terkait pariwisata. Ini memberi masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan.
- c) **Pengembangan Visi Bersama:** Mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam merumuskan visi bersama dan tujuan pembangunan pariwisata. Hal ini memastikan bahwa rencana pariwisata mencerminkan kepentingan dan nilai lokal.
- d) **Analisis Situasi:** Melakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi saat ini di destinasi pariwisata, termasuk aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. Hal ini membantu dalam memahami tantangan dan peluang yang ada.
- e) **Perumusan Rencana Aksi:** Berdasarkan konsultasi dan analisis, mengembangkan rencana aksi yang mencakup kebijakan, strategi, dan program spesifik untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.
- f) **Implementasi Program Pekat Maritim:** Melaksanakan program-program yang telah dirancang dengan memperhatikan partisipasi masyarakat lokal dalam setiap tahap implementasi. Ini dapat melibatkan pelatihan, pengembangan infrastruktur, promosi pariwisata berkelanjutan, dan sebagainya.
- g) **Evaluasi dan Penyesuaian:** Melakukan evaluasi terhadap implementasi rencana aksi secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan dan efektivitasnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, membuat penyesuaian dan perbaikan sesuai kebutuhan dan perubahan situasi.

- h) **Pengembangan Kapasitas Pokdarwis:** Mengembangkan kapasitas masyarakat lokal, organisasi lokal, dan pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat melalui pelatihan, pendidikan, dan pendekatan partisipatif lainnya.
- i) **Pengelolaan Konflik:** Mengidentifikasi dan mengelola konflik yang mungkin muncul antara berbagai pemangku kepentingan atau di antara masyarakat lokal sendiri. Mencari solusi yang inklusif dan berkeadilan untuk menangani perbedaan pendapat.
- j) **Promosi dan Komunikasi:** Terus menerus melakukan promosi dan komunikasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Ini membantu menjaga keterlibatan masyarakat dan mendukung dukungan terhadap upaya partisipatif.

5.Praktek: Integrasi Masyarakat dalam Perencanaan Pengembangan Wisata

Pada bagian ini pemateri meminta para peserta untuk brain storming mengenai integrasi masyarakat lokal dalam perencanaan destinasi pariwisata. Integrasi masyarakat lokal dalam perencanaan destinasi pariwisata adalah proses yang melibatkan partisipasi aktif dan pengambilan keputusan bersama oleh komunitas lokal dalam tahap perencanaan, pengembangan, implementasi, dan pemantauan destinasi pariwisata. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan pariwisata di daerah mereka. Integrasi ini memungkinkan masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam menentukan arah dan bentuk pariwisata yang berkembang di wilayah mereka, serta memastikan bahwa pembangunan pariwisata menguntungkan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi komunitas setempat. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat lokal serta memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pariwisata.

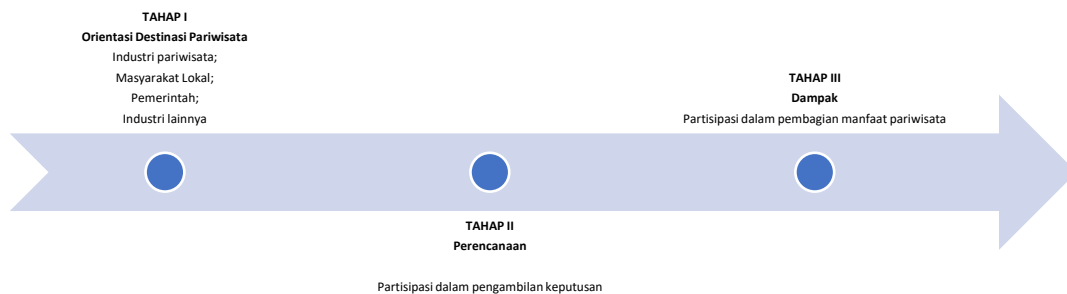
Dalam praktiknya, integrasi masyarakat lokal melibatkan serangkaian kegiatan seperti musyawarah, lokakarya, dan forum diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk warga lokal, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan

pelaku pariwisata. Pendekatan ini memungkinkan adanya dialog terbuka dan partisipatif yang memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak terlibat.

Integrasi masyarakat lokal dalam perencanaan destinasi pariwisata juga dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal, seperti pengembangan usaha mikro dan kecil, promosi produk lokal, dan pemberdayaan komunitas melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan. Secara keseluruhan, integrasi masyarakat lokal dalam perencanaan destinasi pariwisata merupakan landasan yang penting untuk memastikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya guna bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini juga membantu meminimalkan konflik dan meningkatkan keberlanjutan pariwisata dengan memperhatikan partisipasi dan aspirasi masyarakat lokal secara langsung.

Konsep integrasi masyarakat lokal dalam destinasi pariwisata dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. Konsep integrasi masyarakat lokal



6. Praktek: Studi Kasus dan Best Practice

Pada bagian ini pemateri memberikan beberapa contoh kasus pariwisata berbasis masyarakat di Desa Pakraman Pinge dimana adanya dominasi elit dalam pengembangan destinasi pariwisata perdesaan. Dominasi elit ini mempunyai dua dampak mendasar. Pada mulanya kehadiran elite wisata pedesaan mendorong kegiatan pariwisata di Desa Pakramang Pinge.

Berkat kemampuan dan kompetensi para elite tersebut, tunas-tunas wisata pedesaan yang muncul sejak ditetapkan sebagai desa wisata mulai tumbuh dan berkembang kembali. Para elite mulai mengembangkan produk desa wisata melalui program penataan desa, menyiapkan sarana memasak, menetapkan jalur desa, dan memanfaatkan sebagian pemukiman sebagai homestay. Selain itu, para elite juga mulai membentuk organisasi administratif di desa wisata.



Sumber: Dokumentasi Pengabdian kepada masyarakat

Gambar 4. Para peserta foto bersama pemateri dan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas.

D. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Anambas bagi 11 peserta yang merupakan kelompok sadar wisata ini dinilai telah berhasil mencapai tujuannya yaitu berupa penguatan kapasitas kelompok sadar wisata melalui pelatihan pariwisata berbasis masyarakat ini dimana peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip kepariwisataan dalam konteks pelatihan pariwisata berbasis masyarakat; peserta dapat mengimplementasikan konsep dan prinsip pariwisata berbasis masyarakat yang berfokus pada partisipasi komunitas; peserta memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menerapkan kode etik kepariwisataan dalam upaya menjalankan pariwisata berbasis masyarakat. Kegiatan yang diselenggarakan selama 2 kali ini terdiri dari materi dan praktek sekaligus diskusi

mengenai studi kasus. Peserta juga diminta praktek langsung membuat perencanaan pariwisata berbasis masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Adikampana, I M., Pujani, L.P.K.. dan Nugroho, S., 2014, *Dampak Pariwisata Perdesaan Bagi Masyarakat Lokal*, Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2014, Universitas Udayana, 975-978
- Barke, Michael, 2004, *Rural tourism in Spain*, International Journal of Tourism Research, 6: 137-149
- Briedenhann, J. dan Wickens, E., 2004, *Rural Tourism-Meeting the Challenges of the New South Africa*, International Journal of Tourism Research, 6: 189- 203
- Boniface, B., Cooper, C., and Cooper, R., 2012, *Worldwide Destinations; the geography of travel and tourism*, Routledge, London
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem, 2014, *Direktori Kepariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2013*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem, Amlapura
- Dogra, Ravinder and Gupta, Anil, 2012, *Barriers to Community Participation in Tourism Development: Empirical Evidence from a Rural Destination*, South Asian Journal of Tourism and Heritage, 5: 131-142
- Fashri, F., 2104, *Pierre Bourdieu; Menyingkap Kuasa Simbol*, Yogyakarta: Jalasutra
- Garrod, B., Wilson, J.C. and Bruce, D.B., 2001, *Planning for Marine Ecotourism in the EU Atlantic Area: Good Practice Guidelines*, Project Report, University of the West of England, Bristol
- _____ and Var, T., 2002, *Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases*, Routledge, London.
- _____, 2016, *Tourism and Sustainability; Development, Globalisation, and New Tourism in The Third World*, Routledge, New York
- Pike, S., 2004, *Destination Marketing Organisations*, Elsevier, UK
- Reid, D. G., George, E. W., and Mair, H., 2009, *Rural Tourism Development; Localism and Cultural Change*, Channel View Publications, UK
- Roberts, L. and Hall, D., 2004, *Consuming the countryside: Marketing for rural tourism*, Journal of Vacating Marketing, 10: 253-263
- Scheyvens, R., 2002, *Tourism for Development; empowering communities*, Prentice Hall, England
- Singh, S., Timothy, D. J., and Dowling, R. K., 2003, *Tourism in Destination Communities*, CABI, UK

Telfer, Richard and Sharpley, David J., 2008, *Tourism and Development in the Developing World*, Routledge, New York

Timothy, Dallen J., 1999, *Participatory Planning; A View of Tourism in Indonesia*, *Annals of Tourism Research*, 26: 371-391

_____. and Boyd, Stephen W., 2003, *Heritage Tourism*, Pearson Education, England

Tosun, C., 2000, *Limits to Community participation in the tourist development process in developing countries*. *Tourism Management*, 21: 613-633

_____ and Timothy, D.J., 2003, *Arguments for Community Participation in the Tourism Development Process*, *The Journal Of Tourism Studies*, 14: 1-15